**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) HURUF h PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023
DIHUBUNGKAN DENGAN PEMASANGAN BAHAN
KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA KAMPANYE PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024
DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

Mohamad Rifa`I^{*)}

Mohamad_rifa'i@student.unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

Taopik Iskandar^{*)}

taopika@gmail.com

ABSTRACT

Election Campaigns are the activities of an Electoral Participant or other party appointed by an Election Participant to persuade the electorate by offering a vision, mission, program and/or self-image of an Electrician. In the implementation of the election campaign there are several types and methods of election campaign, one of which is using the Campaign Material. The issues studied in this script are about how the implementation of Article 70 paragraph (1) letter h of the General Election Commission Regulation No. 15 Year 2023 is linked to the installation of campaign material in public places in the 2024 simultaneous election campaign in the Baregbeg district of Ciamis district, the obstacles encountered and the efforts made to overcome the problem. The method of research used is a descriptive analytical method that is a way to solve a problem or answer a problem that is being faced, carried out by way of collection, classification, analysis of data concluded with the aim of making an image of a situation objectively as well as using methods of normative jurisprudence approach. Based on the results of the research, it was concluded that the implementation of Article 70 paragraph (1) letter h of the General Election Commission Regulation No. 15 Year 2023 is linked to the installation of campaign materials in public places in the 2024 simultaneous election campaign in Baregbeg district Ciamis district has not been optimally implemented. This is because there are some obstacles in its implementation, among other things the absence of sanctions that give the effect of jera, the lack of socialization of the regulations to the

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

public, difficulty setting the timing of the preparation of campaign materials, lack of supporting facilities in the efforts to organize Campaign Materials installed in high places, installation of Campaigner Materials on trees considered to be cost-saving, as well as a lack of staff of the Pamong Praja Police Unit in efforts to regulate campaign materials. As far as the parties concerned are concerned, they have made every effort to prevent, encourage, socialize and even participate in the settlement of violations of the installation of campaign materials. The General Election Commission of the Republic of Indonesia must improve the rules on the general election campaign, and the Ciamis District Government can provide proper support facilities so that the settlement of violations of the installation of Campaign Materials can be implemented optimally.

Keywords: *Implementation, General Election Commission Regulations, Campaigns, campaign materials*

ABSTRAK

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu ada beberapa jenis dan metode kampanye Pemilu yang salah satunya menggunakan Bahan Kampanye. Adapun jenis Bahan Kampanye adalah berupa poster yang dalam pelaksanaan di lapangan dianggap paling banyak melanggar sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan bahan kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan bahan kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera, kurang tersampainya sosialisasi peraturan kepada masyarakat, kesulitan pengaturan waktu penertiban bahan kampanye, kurangnya fasilitas penunjang dalam upaya penertiban Bahan Kampanye yang dipasang di tempat yang tinggi, pemasangan Bahan Kampanye di pohon dianggap dapat menghemat biaya, serta kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban bahan kampanye. Adapun semua pihak yang bersangkutan telah berupaya untuk mencegah, menghimbau, mensosialisasikan dan bahkan ikut serta dalam penertiban pelanggaran pemasangan bahan kampanye. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus memperbaiki peraturan tentang kampanye pemilihan umum, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat menyediakan fasilitas penunjang dengan baik sehingga penertiban terhadap pelanggaran pemasangan Bahan Kampanye dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Kampanye, Bahan Kampanye

I. Pendahuluan

Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Indonesia, dikarenakan pada tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan Pemilu serentak dimana seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan hak pilihnya untuk menentukan para pemimpin bangsa yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilih untuk memilih lima posisi jabatan politik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas adanya peran dari penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kontestan pemilu dengan pemilih. Komunikasi politik perlu dilakukan agar terikat hubungan timbal balik kontestan dengan warga negara sebagai pemilih. Ikatan akan terbentuk manakala ada kesamaan kepentingan, kebutuhan, harapan pemilih dengan visi politik yang dijanjikan oleh kontestan.¹⁾ Dalam pelaksanaan kampanye ada beberapa jenis dan metode kampanye yang salah satunya menggunakan bahan kampanye. Bahan Kampanye yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Bahan Kampanye Pemilu berbentuk:

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;

¹⁾ Fery Daud Liando. Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*. hlm 119. Diakses 29 Mei 2024. Doi: <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/402/275/2097>.

- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;pin;
- k. alat tulis; dan/atau
- l. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang nampak dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilu pada saat ini diantaranya soal pemasangan Bahan Kampanye peserta Pemilu yang pada kenyataan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. Jalan-jalan protokol;
- e. Jalan bebas hambatan;
- f. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- g. Taman dan pepohonan.

Kemudian di dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”.

Beberapa jenis Bahan Kampanye, berupa poster yang paling banyak melanggar peraturan. Demi bisa mengenalkan calon, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik, beberapa partai politik, tim sukses dan simpatisan partai politik banyak yang kemudian mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya pemasangan bahan kampanye di tempat umum pada kampanye pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten

Ciamis, diantara pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang terjadi yaitu pemasangan bahan kampanye di taman dan pepohonan yang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban umum bahkan merusak pohon jika pemasangannya dengan cara di paku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dalam implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk membantu menganalisa agar dapat memahami serta mampu menyelesaikan permasalahan dari kesenjangan antara teori atau aturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif yaitu mengenai “Implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan

Kampanye di tempat umum pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder yang berupa hukum positif.²⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye Di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan kampanye Pemilu di Kecamatan Baregbeg dapat dilaksanakan. Akan tetapi masih ditemukan pelanggaran terkait pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum yang tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa jenis bahan kampanye, berupa poster yang paling banyak melanggar peraturan. Demi bisa mengenalkan calon, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik, beberapa partai politik, tim sukses dan simpatisan partai politik banyak yang kemudian mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Diantara pelanggaran pemasangan Bahan Kampanye yang terjadi yaitu pemasangan Bahan Kampanye di taman dan pepohonan yang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban umum bahkan merusak pohon jika pemasangannya dengan cara di paku.

Penelitian kemudian dilakukan kepada KPU Kabupaten Ciamis, PPK Kecamatan Baregbeg, Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Panwas Kecamatan Baregbeg, terkait implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu

²⁾ Soetjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. hlm.33.

serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Said Attanjani selaku anggota KPU Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan sosialisai terhadap peserta Pemilu, dalam hal ini partai politik maupun kepada jajaran KPU di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. KPU merasa ikhtiar dengan terus mensosialisasikan aturan-aturan ini namun memang peserta Pemilu dalam hal ini oknum partai politik masih tetap ada yang melanggar. Dalam masalah penertiban biasanya Satpol PP memberikan surat pemberitahuan untuk mengajak KPU ketika penertiban Bahan Kampanye bersama dengan Bawaslu, namun KPU hanya sebagai penonton tidak ikut dalam penertiban. Tapi memang dengan segala keterbatasan dan hal lain penertiban memang tidak sampai kepelosok tapi setidaknya untuk jalan protokol sudah di tertibkan. Beliau juga menyampaikan bahwa permasalahan penertiban merupakan masalah bersama. KPU telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum, dan untuk penertiban ini sudah bukan lagi ranahnya KPU. Untuk himbauan atau sanksi merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bawaslu, dimana Bawaslu sendiri merupakan pengawas dan berhak untuk mengambil tindakan.

Wawancara juga dilakukan kepada pihak PPK Kecamatan Baregbeg. Menurut Elan Jaelani, selaku Ketua PPK Kecamatan Baregbeg, menyampaikan bahwa sosialisai terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu serentak tahun 2024 telah di laksanakan oleh PPK Kecamatan Baregbeg. Sosialisasi peraturan Pemilu telah dilakukan seperti dalam rapat kordinasi, akan tetapi pola berpikir peserta Pemilu berbeda dengan PPK sendiri. PPK sebagai penyelenggara Pemilu berpikir mengenai benar dan salah, sedangkan peserta Pemilu berpikir tentang menang dan kalah. Jadi peserta Pemilu lebih mementingkan terkait bagaimana cara mereka untuk mensosialisaikan lebih masif dan murah.

Masih berdasarkan hasil wawancara. Menurut Yana Herdiana, selaku staf pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Ciamis mengatakan bahwa berkaitan dengan Bahan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan pendataan hasil koordinasi dengan Panwascam sekabupaten Ciamis, kemudian data tersebut diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk di tertiban, dengan catatan sebelumnya telah melakukan himbauan kepada pengurus partai politik untuk menertibkan atau memindahkannya sendiri. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam hal penertiban Bahan Kampanye selalu bekerja sama dengan Satpol PP dikarenakan untuk esekusi penertiban itu dengan melalui surat himbauan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Surat Edaran Bupati Kabupaten Ciamis untuk perintah penertiban.

Wawancara dilanjutkan kepada narasumber selanjutnya, yaitu pihak Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kecamatan Baregbegeg. Elsa Herpiani sebagai anggota Panwas Kecamatan Baregbegeg mengatakan bahwa telah melaksanakan sosialisasi dan himbauan terhadap peserta Pemilu agar Pemasangan Bahan Kampanye dengan cara di tempel di pohon tidak dilakukan. menurut Elsa, yang dimaksud dengan dilarang dipasang di pohon adalah dilarang memasang dengan cara apapun baik di paku, pakai kawat atau dengan cara lainnya, intinya dilarang di pasang di pohon. Alasannya karena mengganggu keindahan, dan ketertiban umum bahkan merusak pohon jika pemasangannya dengan cara dipaku. Peserta Pemilu di sarankan untuk membuat sendiri bingkai untuk bahan kampanyenya jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan merusak alam.

Kenyataan di lapangan masih banyak pelanggaran terjadi dikarenakan masyarakat tidak memahami atau bahkan tidak tau terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Panwas Kecamatan Baregbegeg melakukan inventarisir dan pendataan terlebih dahulu, Alat Pergi Kampanye atau Bahan Kampanye yang melanggar aturan, selanjutnya Panwascam menyampaikan kepada Bawaslu, dari Bawaslu lalu disampaikan kepada Satpol

PP atau sebelum penertiban di lakukan oleh Satpol PP, Bawaslu menghimbau kepada pengurus partai politik untuk menertibkannya sendiri agar tidak di tertibkan Satpol PP dengan cara memindahkan pemasangan ke tempat yang di perbolehkan.

3.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye Di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Di dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum, tentu saja mempunyai kendala dalam pelaksanaannya hambatan, baik faktor dari peraturan itu sendiri maupun dari masyarakat. Masih berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Bahan Kampanye. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Faktor Sanksi

Berkaitan dengan sanksi, menurut Said Attanjani sebagai salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Ciamis, menyampaikan bahwa aturan yang digunakan masih menggunakan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan tidak ada perubahan di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Beliau mengatakan bahwa sanksi tersebut masih ringan dan tidak memberi efek jera. Sanksi yang terdapat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum hanya sanksi administrasi saja. Sanksi tersebut hanya berisi perintah untuk mencabut dan memindahkan Bahan Kampanye sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78, bahwa “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga

Kampanye Peserta Pemilu. Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja”.

Mengingat banyak pelanggaran Bahan Kampanye, seakan sanksi yang telah diatur tidak di patuhi dan ditakuti. artinya, sanksi tersebut sama sekali tidak membuat para pelanggar merasa jera. Pernah oleh pihak Panwascam mencabut Bahan Kampanye yang dipasang di lokasi yang dilarang, namun besoknya dipasang kembali. Ini menandakan bahwa sanksi pencabutan yang dilakukan oleh pihak Panwascam belum membuat para pelanggar jera. Hal inilah yang menghambat faktor penegakan hukum.

Berkaitan dengan sanksi administrasi dalam pelanggaran pemasangan bahan kampanye menurut Said Attanjeni mengatakan bahwa, sanksi yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal larangan pemasangan Bahan Kampanye sudah diterapkan dan sudah dijalankan, namun hambatannya adalah sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada setiap pelanggar. KPU Kabupaten Ciamis berharap sanksi tersebut akan lebih berat dan memberi efek jera agar pelanggar bahan kampanye dapat berkurang.

2. Kurang tersampainya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Seluruh narasumber baik dari pihak KPU Kabupaten Ciamis PPK Kecamatan Baregbeg, Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Panwas Kecamatan Baregbeg merasa sudah berikhtiar semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan peraturan terhadap masyarakat, namun masih tetap terjadi pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak partai politik, tim sukses maupun calon legislatif. Kurang kesadaran dari pihak-pihak yang bersangkutan terkait sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan

Umum inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam proses Pemilu baik bagi Peserta Pemilu maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai simpatisan. Mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan Bahan Kampanye, dan patut disayangkan jika sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

3. Waktu

Waktu dalam pencabutan Bahan Kampanye merupakan kendala dalam penegakan hukum. Dikarenakan pada saat pencabutan bahan kampanye menurut Elsa Herpiani mengatakan sangat sulit mengatur waktu, karena harus di evaluasi tengah malam. Alasannya karena ada beberapa caleg jika Bahan Kampanye sudah dicabut maka akan dipasang kembali, kemudian jika pencabutan Bahan Kampanye yang dipasang di jalan-jalan dilakukan pada siang hari maka kendalanya itu mengganggu ketertiban di jalan umum. Inilah yang membuat pihak Panwascam Baregbeg yang bekerjasama dengan Satpol PP mencabut Bahan Kampanye pada malam hari. Pada saat pencabutan Bahan Kampanye waktunya pun harus tengah malam antara pukul 00.00 WIB sampai pukul 04.30 WIB dengan tujuan tidak mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas.

4. Sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertiban bahan kampanye.

Menurut Yana Herdiana bahan kampanye seperti Poster yang kebanyakan di pasang di jalan raya, pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika di evaluasi oleh pihak Bawaslu yang juga bekerjasama dengan Satpol PP membutuhkan fasilitas seperti mobil *crene* untuk membersihkan bahan kampanye di tempat yang tidak bisa di jangkau. Namun penyediaan fasilitas tersebut tidak ada, karena di pihak

Bawaslu tidak ada pembiayaan untuk hal itu. Pihak Bawaslu kabupaten ciamis merasa sangat kesulitan ketika mengevaluasi Poster yang dipasang tinggi tidak bisa di jangkau. Maka untuk mengevaluasi bahan kampanye yang tinggi, pihak Bawaslu sebelumnya meminta fasilitas kepada pemerintah Kabupaten Ciamis.

5. Menghemat Biaya

Masih menurut Elan Jaelani, pemasangan Bahan Kampanye di pohon dirasa cukup simpel, karena hanya cukup di paku atau pakai kawat, selain itu rata-rata yang memasang bahan kampanye di pohon bukan dari pengurus atau anggota partai politik itu sendiri melainkan buruh (orang suruhan partai politik) dimana kebanyakan dari mereka tidak paham atau bahkan tidak mengetahui terkait dengan aturan yang berlaku.

6. Kurangnya jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Ciamis

Menurut Yana Herdiana, ketika Bawaslu melakukan evaluasi dengan Satpol PP kesulitan untuk menertibkan Bahan Kampanye dikarenakan kurangnya jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Ciamis yang menyebabkan tidak maksimalnya penertiban Bahan Kampanye di tempat umum dimana cakupan Wilayah Kabupaten Ciamis yang cukup luas.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 70 ayat (1) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye Di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian yang dilakukan Penulis dengan melakukan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Ciamis, PPK Kecamatan Baregbeg, Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Panwas Kecamatan Baregbeg dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan bahan kampanye, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Ciamis

- a) Rapat Koordinasi Sosialisasi Kirab Pemilu Tahun 2024 Bersama Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Ciamis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menyelenggarakan rapat sosialisasi kirab Pemilu tahun 2024 bersama partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Ciamis. Dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023. Acara Rapat Koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis Sarno Maulana Rahayu, dan dilanjutkan pemaparan materi serta arahan terkait dengan Kirab Pemilu maupun hal-hal teknis lainnya oleh Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM, Muharam Kurnia Drajat.

- b) Rapat Koordinasi Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Serta Peningkatan Kapasitas Dengan Tenaga Pendukung PPK Se-Kabupaten Ciamis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi tahapan pemilu 2024 serta peningkatan kapasitas dengan tenaga pendukung PPK Se-Kabupaten Ciamis. Dilaksanakan pada hari bertempat di Aula KPU Kabupaten Ciamis.

- c) Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dengan Tema "Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" Bersama Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Cabang Ciamis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota KPU Divisi Hukum Pengawasan Said Attanjani serta didampingi Sekretaris KPU Agus Kurnianto melaksanakan sosialisasi pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan tema "Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa" bersama Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Cabang Ciamis. Dilaksanakan pada hari Rabu, 22 November 2023.

- d) Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dengan Tema "Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" Bersama Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Ciamis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota KPU Divisi Hukum Pengawasan Said Attanjani serta didampingi Sekretaris KPU Agus Kurnianto melaksanakan sosialisasi pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan tema "Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa" bersama Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Ciamis yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 November 2023.

2. PPK Baregbeg

- a) Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024 "Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa"

KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan sosialisasi pemilihan umum serentak tahun 2024 di wilayah dapil 6 meliputi Kecamatan Baregbeg, Cijeungjing, Cidolog, Cimaragas, Pamarican, yang dihadiri oleh PPK dan PPS Sedapil 6 di Kabupaten Ciamis. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Gor Miftahussalam Kec. Cijeungjing.

- b) Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Baregbeg.

PPK Baregbeg melaksanakan rapat koordinasi pengawasan pendistribusian logistik pemilu 2024 dengan Panwas Kecamatan Baregbeg. Dilaksanakan pada Senin, 18 Desember 2023 bertempat di Cafe Cimuntur.

- c) Sosialisasi regulasi dan produk hukum dalam menghadapi tahapan Pemilu tahun 2024.

PPK Baregbeg melaksanakan sosialisasi regulasi dan produk hukum dalam menghadapi tahapan pemilu tahun 2024.

Dilaksanakan pada jum'at, 22 desember 2023 bertempat aula dinas pendidikan.

3. Bawaslu Kabupaten Ciamis

- a) Apel Siaga Pengawasan Kampanye Menjelang Pilpres 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ketua, Anggota serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis, melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Kampanye Menjelang Pilpres 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat, bertempat di Halaman Gedung Sate, Bandung. Peserta apel ini merupakan gabungan dari 27 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dan Panwaslu Kecamatan se-Bandung Raya. Apel ini tentu menegaskan kesiapan seluruh jajaran Bawaslu untuk mengawasi tahapan kampanye yang akan digelar selama 75 hari mulai tanggal 28 November 2023 mendatang. Dilaksanakan di Bandung, 23 November 2023.

- b) Rapat Koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan untuk Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan untuk Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas. Kegiatan ini dihadiri Kordiv Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan Irham Fathiyah Shulha, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Fanny Dwiriantini, Kordiv Penangan Pelanggaran Data dan Informasi Samsul Maarif. Kegiatan dibuka oleh Kordiv SDMO Diklat, Irham Fathiyah Shulha. Dalam sambutannya ia memberikan arahnya terkait saat ini ada pada tahapan pengawasan logistik, bahwasannya kita semua jajaran pengawas pemilu harus sudah semakin siap,

bersinergi, dan tidak lupa menjaga kesehatan karena pekerjaan pengawasan yang sudah makin intens yang akan menguras waktu, tenaga dan pikiran, Irham berharap dengan Rakor ini dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam dari para narasumber dan dapat di implementasikan di kerja-kerja pengawasan, tentunya untuk penguatan SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan. Dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2023

- c) Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ciamis. Bawaslu Kabupaten Ciamis menghadiri undangan KPU Kabupaten Ciamis terkait dengan Rapat Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ciamis. Hadir dalam kegiatan tersebut Kordiv SDMO Diklat, Irham F. Shulha beserta staf. Pada kesempatan itu, Irham menyampaikan bahwa pelaksanaan kampanye tidak bisa lepas dari aturan yang sudah ditetapkan. "Bawaslu hadir untuk memastikan peserta pemilu taat dan patuh terhadap kerangka regulasi", jelasnya. Beliau menambahkan bahwa kewenangan Bawaslu yakni melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan, termasuk proses penanganan sengketa proses pemilu. Adapun, langkah persuasif yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pencegahan yakni dengan himbauan. "Pada prinsipnya lebih baik mencegah daripada menindak, sehingga kami mengedepankan pencegahan daripada penindakan", Menghadapi Tahapan yang sangat krusial yaitu kampanye, intensitas dan ritme pada tahapan kampanye akan sangat meningkat. Dan dalam hal ini, Bawaslu memastikan seluruh jajaran siap menghadapi dinamika kedepan. Dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023.
- d) Apel Siaga Pengawasan sebagai tanda kesiapan menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Dilaksanakan pada tanggal 27

November 2023. Bawaslu Kabupaten Ciamis bersama jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ciamis menggelar Apel Siaga Pengawasan sebagai tanda kesiapan menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bertempat di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16 Ciamis. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ciamis beserta jajaran Forkopimda dan beberapa Dinas/Instansi di lingkup Pemkab Ciamis, serta unsur Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin. Dalam amanatnya, Jajang menyampaikan beberapa arahan sebagaimana yang ditekankan oleh Ketua Bawaslu RI, yakni pertama, pastikan semua jajaran pengawas Pemilu memahami dengan baik aturan dan regulasi yang mengatur kampanye Pemilu. Kedua, Jalin kerjasama yang erat dengan instansi terkait. Ketiga, Buat rencana pengawasan kampanye strategis. Keempat, Manfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan data dan pemantauan. Kelima, Bangun jaringan pengawasan yang luas. Keenam, adopsi pendekatan proaktif dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Ketujuh, susun mekanisme pelaporan yang efektif. Kedelapan, lakukan program edukasi Masyarakat. Terakhir, koordinasi dengan KPU di Wilayah masing-masing, untu mendapatkan akses SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). Adapun Wakil Bupati Ciamis, Yana D. Putra, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam mensukseskan Pemilu ini, ia mengatakan bahwa kampanye yang damai dan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil ini bisa terselenggara dan sukses bukan hanya oleh KPU dan Bawaslu saja namun butuh kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Ciamis.

- e) Giat Deklarasi Ciamis dengan tema "Anteng" dilaksanakan pada tanggal 17,Desember 2023. Giat Deklarasi Ciamis "Anteng" dilakukan di Aula Hotel Tiara Ciamis, pada Minggu (17/12/2023), dihadiri perwakilan seluruh Partai Peserta Pemilu 2024, Forkopimda, Stakeholder, serta unsur TNI/Polri. Kata Anteng sendiri akronim dari 'aman, netral, tertib, tenang'. Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin mengajak tokoh penting dan peserta rapat koordinasi yang hadir dalam acara Deklarasi Ciamis Anteng menjaga keamanan dan keberlangsungan Pemilu 2024 dengan damai."Mari kita semua mewujudkan pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi yang berjalan dengan damai. Pemilu merupakan sebuah kontestasi. dan rakyat-lah yang menjadi juri," ujarnya. Deklarasi Ciamis Anteng bukan hanya seremonial semata. Ia mendorong agar seluruh stakeholder, di Kabupaten Ciamis bahu membahu mewujudkan komitmen ini untuk kemaslahatan rakyat. "Kita ingin deklarasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Ciamis dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Sehingga seluruh proses Pemilu 2024 berjalan aman dan damai serta meningkatkan kuantitas dan kualitas Pemilu di Indonesia dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan deklarasi Ciamis Anteng menunjukkan semua pihak memiliki kesepakatan bahwa Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada harus berjalan dengan aman, damai dan lancar. Dalam giat Rapat Koordinasi ini, Bawaslu juga melakukan sosialisasi pengawasan masa kampanye dengan menghadirkan narasumber Dr. Ahmad Jamaludin, MH (Akademisi Uninus) serta Erik Kurniawan (Direktur Ekskeutif SPD).
- f) f).Sosialisasasi Produk Hukum Perbawaslu No 16 Tahun 2023
Sosialisasasi Produk Hukum Perbawaslu No 16 Tahun 2023.

Dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 bertempat di Larissa Hotel.

- g) Rakor Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 Bersama Stake Holder Rakor Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 Bersama Stake Holder. Dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 bertempat Di Kantor Bawaslu Kabupaten Ciamis

4. Panwascam Baregbeg

- a) Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024.

Panwascam Baregbeg ikuti Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024. Apel Siaga dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Ciamis bersama Panwascam se-Kabupaten Ciamis. Dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023. Rakor Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024.

- b) Panwascam Baregbeg Koordiv PPPS, Staff PPPS dan Staff HPPH ikuti Rakoor Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Koordiv PPPS, Staff PPPS dan Staff HPPH se-Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan di Hotel Amaris Tasikmalaya. Dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2023.

- c) Rapat Kerja Teknis Strategi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024. Panwascam Baregbeg mengadakan Rapat Kerja Teknis Strategi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Kasi Trantib Kecamatan Baregbeg, Danposramil Baregbeg, PPK Baregbeg, PKD Se-Kecamatan Baregbeg. Dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023. bertempat di Balai Pertemuan Dusun Saguling Kolot. Dengan pematerian disampaikan oleh akademisi Unsil yaitu Bapak Rino Sundawa Putra.

- d) Bangun Sinergitas dengan teman-teman pers untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Panwascam Baregbeg Bangun Sinergitas dengan teman-teman pers untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Kami sepakat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terutama menangkali isu SARA, Ujian Kebencian dan Hoax. Hal ini sebagai upaya menciptakan pemilu yang terkonsolidasi. Dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023.
- e) Rapat Rutin bersama PKD se-Kecamatan Baregbeg. Panwascam Baregbeg Adakan Rapat Rutin bersama PKD se-Kecamatan Baregbeg. Rapat Rutin dihadiri oleh Jajaran Panwascam Baregbeg, Kesekretariatan, PKD se-Kecamatan Baregbeg. Rapat Rutin kali ini membahas mengenai Logistik, Pengawasan Zonasi APK, DPTb dan DPK. Dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2023.
- f) Rakor Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/ Kota. Panwascam Baregbeg mengadakan Rakor Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/ Kota. Acara Rakor dilaksanakan di Aula Sekretariat Panwascam Baregbeg dan dihadiri oleh Camat Kecamatan Baregbeg, Unsur TNI POLRI, Jajaran PPK Baregbeg, Jajaran Sekretariat Panwascam Baregbeg serta PKD se-Kecamatan Baregbeg. Dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023.
- g) PKD se-Kecamatan Baregbeg mengikuti Rakernis Pengawasan Masa Kampanye dan Logistik. PKD se-Kecamatan Baregbeg mengikuti Rakernis Pengawasan Masa Kampanye dan Logistik bersama PKD se-Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan di Grand Metro Hotel Tasikmalaya. Dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2023.
- h) Rakor Rutin bersama PKD se-Kecamatan Baregbeg dan Kesekretariatan Kecamatan Baregbeg.

- i) Rapat Koordinasi Panwaslu Kecamatan dan Desa bersama PPK dan PPS Kecamatan Baregbeg. Rapat Koordinasi Panwaslu Kecamatan dan Desa bersama PPK dan PPS Kecamatan Baregbeg. Dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal. Pihak KPU Kabupaten Ciamis, PPK Kecamatan Baregbeg, Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Panwascam Baregbeg telah berikhtiar untuk bisa menyampaikan kepada semua elemen dan lapisan masyarakat mulai dari partai politik, simpatisan partai politik , *stake holder*, mahasiswa dan masyarakat umum terkait dengan larangan pemasangan bahan kampanye di tempat umum. Akan tetapi masih terdapat pelanggaran baik dari partai politik, tim sukses simpatisan partai politik dan buruh (orang suruhan partai politik) banyak yang kemudian mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantara pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan Bahan Kampanye di taman dan pepohonan yang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban

umum bahkan merusak pohon jika pemasangannya dengan cara di paku.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, antara lain karena sanksi yang tidak memberi efek jera, kurangnya antusias sosialisasi, kendala waktu penertiban, sarana dan fasilitas penunjang hingga penghematan biaya serta kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam upaya penertiban Bahan Kampanye.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 dihubungkan dengan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum pada kampanye Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. KPU Kabupaten Ciamis, PPK Kecamatan Baregbeg, Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Panwascam Baregbeg di bantu dengan Satpol PP telah dilakukan untuk mencegah, menghimbau, mensosialisasikan dan bahkan ikut serta dalam penertiban bahan kampanye di tempat umum terutama yang dipasang di taman dan pepohonan. Namun upaya yang dilakukan masih kurang maksimal dimana Bawaslu dan Panwascam Baregbeg berharap agar wewenang penuh terkait dalam proses penegakan hukum diberikan kepada Bawaslu, mulai dari hakim dan jaksa harus dari pihak Bawaslu. Ini juga upaya untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu. Selain itu Panwascam itu seperti "*harimu tak bertaring*", dimana Panwas itu tidak bisa menertibkan secara langsung, panwas hanya bisa mengawasinya saja tidak bisa melakukan eksekusi kalau pun ikut palingan hanya ikut membantu

melipat alat peraga kampanye atau bahan kampanye yang ditertibkan untuk pencopotan dan penurunan Panwas tidak memiliki kewenangan, Panwas baru bisa menertibkan setelah kampanye selesai, yaitu di masa tenang dan hari pemungutan suara.

4.2 Saran

1. Kepada KPU-RI diharapkan untuk memperbaiki peraturan ini agar Bawaslu bisa menindak tegas kepada oknum peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum, sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang serupa.
2. Penyelenggara Pemilu dalam mengoptimal sosialisasi peraturan atau menyampaiakan himbauan larangan pemasangan Bahan Kampanye di tempat umum dapat menggunakan media sosial secara masif.
3. Penyelenggara pemilu juga bisa melibatkan masyarakat umum dan memanfaatkan agen Pemilu yang direkrut dari Gen-Z dalam pengoptimalan sosialisai terkait pemasangan bahan kampanye di tempat umum. sehingga *mindset* peserta pemilu dapat terbina dengan baik karena sosialisai yang dikakukan sampai ke hilir .
4. Diharapkan sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertiban Bahan Kampanye. Seperti mobil *crene* untuk membersihkan bahan kampanye di tempat yang tidak bisa di jangkau. Pihak pemerintah Kabupaten Ciamis dapat penyediaan fasilitas tersebut karena di pihak Bawaslu Kabupaten Ciamis merasa sangat kesulitan ketika mengevaluasi Poster yang dipasang tinggi tidak bisa di jangkau.
5. Diharapkan untuk jumlah petugas Satpol PP di Kabupaten Ciamis untuk di tambah lagi agar maksimalnya penertiban Bahan Kampanye di tempat umum yang tidak sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani Alamsyah. 2012. *Etika Politik*, Makassar: Alauddin University Press.
- Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- _____. 2004. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardi Fardiansyah. Nanda Dwi Rizkia. Suanto. Merlien Irene Matitaputty. Yeyen Subandi. Zuhairi Sanofi. Nahdia Nazmi. Heryan. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. Jemmy J. Pietersz. Nurhana Marantika. Ade Putra Ode Amane. Andi Hartati. 2023. *Hukum Pemilu*. Bandung: Widina Media Utama.
- Husein Umar. 2022. *Research Method in Finance and Banking*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Indra Pahlevi. 2015. *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dan Azza Grafika*
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.: Jakarta: (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- _____. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers
- Linlin maria, Dion marendra. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintah
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu : Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan*. Bekasi : Gramata Publishing
- Soekanto Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT .Grafindo Persada
- Syamsuddin Haris. 1997. *Struktur Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum*. Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : PPW-LIPI,

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

C. Sumber lainnya

- Evi Noviawati, dkk. 2017. *Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Diakses tanggal 1 Oktober 2024. Doi : <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100>
- Budiono. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol.13 No.1 Oktober 2017. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/557708-menggagas-sistem-pemilihan-umum-yang-ses-cb389463.pdf>.
- Refly Harun, 2019 disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo.
- Fery Daud Liando. Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu BawasluDKIJakarta*.<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/402/275/2097>.